

**KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMBANGUNAN DI DESA PONGKAR KECAMATAN TEBING KABUPATEN
KARIMUN 2017**

Dhani Akbar, S.S., M.A

Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Tanjungpinang
ritttersarmy@gmail.com

ABSTRAK

Faktor kesadaran dan partisipasi masyarakat merupakan kunci keberhasilan Pembangunan Desa. Namun pada saat sekarang ini untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya usaha-usaha pembangunan sangatlah sulit, sehingga pembangunan tidak bisa berjalan dengan baik. Disinilah pentingnya seorang Kepala Desa, karena sebagai pemimpin didalam masyarakat Desa, Kepala Desa hendaknya mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi masyarakat agar berpartisipasi dalam pembangunan. Mempengaruhi masyarakat ini bisa dengan memberikan motivasi, sosialisasi dan pengawasan pada saat pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Kepemimpinan Kepala Desa berpengaruh terhadap partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun. Adapun hasil perhitungan untuk hipotesa tentang pengaruh kepemimpinan Kepala Desa terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan menunjukkan angka kolerasi 0,499. Kesimpulan yang diambil dari penelitian ini adalah "Kepemimpinan Kepala Desa mempunyai pengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan walaupun tingkat kolerasinya (hubungannya) tidak tinggi atau rendah (sedang), tetapi hubungannya signifikan".

Kata Kunci: Kepemimpinan, Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Desa

PENDAHULUAN

Pada hakekatnya tujuan pembangunan adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam merealisasikan tujuan pembangunan, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Begitu pula dengan potensi manusia berupa masyarakatnya harus ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya agar dapat menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam secara maksimal demi tercapainya program pembangunan.

Pembangunan Desa sesungguhnya merupakan upaya-upaya sadar dari masyarakat dan pemerintah baik dengan menggunakan sumber daya yang bersumber dari Desa, bantuan Pemerintah maupun bantuan Organisasi-Organisasi/ Lembaga Domestik maupun Internasional untuk menciptakan perubahan-perubahan kearah yang lebih baik. Faktor kesadaran dan partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan Pembangunan Desa. Karena masyarakat merupakan penggerak pada proses pelaksanaan pembangunan tersebut. Namun pada saat sekarang ini untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya usaha-usaha pembangunan sebagai sarana memperbaiki kondisi sosial dan Desa yang selama ini sudah terlalu identik dengan keterbelakangan dan ketertinggalan dalam berbagai aspek kehidupan sangatlah sulit. Dikarenakan minimnya tingkat kesadaran tersebut sehingga pembangunan tidak bisa berjalan dengan baik. Disinilah pentingnya seorang Kepala Desa. Sebab pada tingkatan pemerintahan paling bawah, Kepala Desa sebagai aktor dalam menjalankan kepemimpinannya berperan dalam melakukan rentetan usaha bersama masyarakat untuk perbaikan dalam segala aspek kehidupan di Desa.

Dalam hal ini kepala desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun yang berperan sebagai pemimpin di dalam Desa tersebuthendaknya memiliki kemampuan untuk memberikan motivasi kepada masyarakat agar mau berpartisipasi di dalam pelaksanaan pembangunan, baik itu partisipasi dalam bentuk tenaga, uang maupun barang sebagai perlengkapan untuk pelaksanaan Pembangunan Desa. Hal tersebut telah dilakukan oleh Kepala

Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun, dibuktikan dengan Kepala Desa memberikan pengarahan kepada seluruh masyarakatnya mengenai pentingnya pembangunan yang akan dilaksanakan ini demi masyarakat pada saat pembukaan pelaksanaan pembangunan.

Kepala Desa maupun Aparat Desa hendaknya mampu mensosialisasikan dengan jelas kepada seluruh masyarakat tentang pelaksanaan pembangunan, seperti sosialisasi mengenai apa jenis pembangunan yang akan dilaksanakan, dimana pembangunan tersebut akan dilaksanakan, kapan pembangunan akan mulai dilaksanakan serta siapa-siapa saja yang harus terlibat didalam pelaksanaan pembangunan tersebut, sosialisasi tersebut misalnya dengan melakukan pertemuan antara Kepala Desa dengan masyarakat, ataupun dengan mendatangi langsung satu persatu masyarakatnya untuk mensosialisasikan kegiatan gotong royong, yang hendaknya dilakukan oleh Kepala Desa maupun Aparat Desanya. Namun kenyataannya, sosialisasi disini masih sangat kurang, sehingga masyarakat masih banyak yang tidak mengerti dengan kegiatan pembangunan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan hanya sedikit masyarakat yang mau hadir pada saat kegiatan gotong royong pelaksanaan pembangunan meskipun pada saat libur kerja. Dengan alasan mereka tidak mengetahui bahwa pada hari itu ada kegiatan gotong royong karena tidak ada yang memberitahukan.

Selain itu Kepala Desa juga diharapkan bisa memberikan pengawasan yang maksimal pada saat pelaksanaan Pembangunan Desa tersebut, sehingga pembangunan bisa berjalan dengan lancar. Namun, pada kenyataannya pada saat pelaksanaan pembangunan, masih kurangnya pengawasan dari Kepala Desa, hal ini dibuktikan dengan ketidakhadiran Kepala Desa pada saat kegiatan pelaksanaan Pembangunan Desa yang ada di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun. Sehingga pembangunan tidak bisa

berjalan dengan maksimal. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pengaruh dari pemerintah dalam hal ini Kepala Desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat demi tercapainya pelaksanaan Program Pembangunan yang maksimal.

Sesuai dengan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan akan melihat secara lebih mendalam pada permasalahan yang ada. Maka didalam penelitian ini peneliti mengambil judul tentang ***“Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun”***.

KERANGKA TEORITIS

1. Teori kepemimpinan

Menurut Rivai (2006: 2) definisi kepemimpinan secara luas meliputi proses mempengaruhi dalam mencapai tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa para pengikutnya, pengorganisasian dan aktivitas-aktivitas untuk mencapai sasaran. Adapun pengertian kepemimpinan menurut Wahjosumidjo (2001: 25) kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi perilaku orang lain dalam rangka perumusan dan pencapaian tujuan organisasi dalam situasi tertentu.

Sedangkan menurut Thoha (2006: 121) “Kepemimpinan adalah aktifitas untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar mereka mau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu”. Orang yang menjalankan kepemimpinan selanjutnya disebut pemimpin. Pemimpin memiliki peranan penting dalam suksesnya pencapaian tujuan suatu kelompok/organisasi.

Lebih jauh Widjaja (2005: 31) mengemukakan bahwa “Kepemimpinan secara umum merupakan kemampuan seseorang (pemimpin) untuk mempengaruhi orang lain, sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana yang dikehendaki pemimpin tersebut”. Menurut Rivai (2006: 148) “Peran kepemimpinan dapat diartikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dilakukan seseorang sesuai dengan kedudukannya sebagai pemimpin”. Jadi dapat dinyatakan bahwa peranan Kepala Desa adalah perilaku yang teratur dan timbul karena kedudukan atau posisinya sebagai Kepala Desa.

Dengan demikian pada dasarnya bahwa kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi perilaku orang lain dalam rangka perumusan dan pencapaian tujuan organisasi didalam situasi tertentu. Kepemimpinan terkadang dipahami sebagai kekuatan untuk menggerakkan dan mempengaruhi orang. Kepemimpinan sebagai sebuah alat, sarana atau proses membujuk orang agar mau melakukan sesuatu secara sukarela. Dalam menjelaskan konsep kepemimpinan tersebut menurut Sudriamunawar (2006: 2) ada beberapa konsep kepemimpinan yang harus diperhatikan dalam mempengaruhi bawahannya. Diantaranya:

- a. Kekuasaan yaitu pengaruh kepemimpinan berupa kewenangan bagi seorang pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya agar mau dengan senang hati mengikuti kehendaknya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- b. Kewibawaan yaitu pengaruh kepemimpinan yang dilihat dari berbagai keunggulan yang dimiliki seorang pemimpin sehingga membedakan dengan yang dipimpinnya, dengan keunggulan tersebut membuat orang lain patuh dan bersedia melakukan kegiatan-kegiatan yang dikehendakinya.

- c. Kemampuan yaitu pengaruh kepemimpinan dari keseluruhan daya tarik berupa keterampilan sosial maupun keterampilan teknik yang dimiliki seorang pemimpin yang melebihi orang lain.

Sebagai seorang pemimpin, peranannya sangat diharapkan didalam organisasi. Menurut Rivai (2006: 148) "Peran kepemimpinan dapat diartikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dilakukan seseorang sesuai dengan kedudukannya sebagai pemimpin". Covey (dalam Rivai, 2003: 156) membagi peran kepemimpinan menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. *Pathfinding* (pencarian alur), yaitu peran untuk menentukan visi dan misi yang pasti
- b. *Aligning* (penyelaras), yaitu peran untuk memastikan bahwa struktur, sistem dan proses operasional organisasi memberikan dukungan pada pencapaian visi dan misi
- c. *Empowering* (pemberdaya), yaitu peran untuk menggerakkan semangat dalam diri orang-orang dalam mengungkapkan bakat, kecerdikan dan kreativitas untuk mampu mengerjakan apapun dan konsisten dengan prinsip-prinsip yang disepakati.

Didalam kepemimpinan terdapat kegiatan pengaruh mempengaruhi serta menggerakkan bawahannya untuk mencapai tujuan. Agar dapat berhasil dalam memimpin bawahannya, selain harus memiliki kualitas maupun sifat, pemimpin juga dituntut agar dapat mempengaruhi bawahannya. Menurut Bass dan Riggio (2006: 20) kepemimpinan mempunyai tiga dimensi, yaitu:

- a. *Idealized influence* (Mengidealkan Pengaruh), menggambarkan perilaku pemimpin yang membuat para pengikutnya mengagumi, menghormati dan sekaligus mempercayainya.

- b. *Motivation* (Memotivasi), menggambarkan seorang pemimpin yang mampu meningkatkan motivasi dan mendemomstasikan komitmennya untuk pencapaian tujuan.
- c. *Inspirational* (Menginspirasi), menggambarkan seorang pemimpin yang mampu membimbing dalam menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi.

2. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007:27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada dimasyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Hal ini selaras dengan konsep *man-centred development* (suatu pembangunan yang dipusatkan pada kepentingan manusia), yaitu jenis pembangunan yang lebih diarahkan demi perbaikan nasib manusia dan tidak sekedar sebagai alat pembangunan itu sendiri. Wang dalam Awang (2006: 61) mendefinisikan “Partisipasi sebagai proses kegiatan yang dilakukan oleh seorang ataupun oleh kelompok sebagai pernyataan kepentingan mereka untuk menyumbangkan tenaga dan sumber lainnya kepada institusi sosial dan sistem yang mengatur kehidupan mereka”. Lebih jauh Wang mendefinisikan partisipasi terbagi menjadi:

- a. *Voluntary participation*, partisipasi secara suka rela atau partisipasi yang berasal dari masyarakat sendiri. Derajat partisipasi berkaitan dengan tingkat pendidikan masyarakat. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan, maka partisipasi secara suka rela akan semakin tinggi pula.

- b. *Induced participation*, partisipasi setengah-setengah yaitu sebagian berasal dari pemerintah dan sebagian lagi dari swadaya masyarakat.
- c. *Forced participation*, partisipasi yang dipaksakan atau disebut juga dengan mobilisasi.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, pembangunan di desa merupakan model pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya wilayah Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 Permendagri No. 66 tahun 2007, karakteristik pembangunan partisipatif diantaranya direncanakan dengan pemberdayaan dan partisipatif. Pemberdayaan yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan partisipatif yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.

3. Teori Pembangunan

Pembangunan pada dasarnya merupakan suatu usaha perubahan untuk mengembangkan diri pada suatu keadaan dan sifat tradisional menuju kearah yang lebih baik, hal ini umumnya dikenal di negara-negara berkembang sebagai suatu proses perubahan sosial yang besar. S.P. Siagian (2002: 2) mengartikan "Pembangunan ialah suatu usaha atau rangkaian usaha atau pertumbuhan dan perubahan yang sederhana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa".

Selanjutnya Todaro (2006:3) mengembangkan bahwa “Sedikitnya pembangunan harus memiliki tiga tujuan yang satu sama lain saling terkait yaitu:

- a. Meningkatkan ketersediaan dan memperluas distribusi barang kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan dan perlindungan kepada seluruh anggota masyarakat;
- b. Mencapai kualitas hidup yang bukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan secara material, melainkan juga mewujudkan kepercayaan diri dan kemandirian bangsa. Aspek ini meliputi peningkatan pendapatan, penyediaan lapangan kerja, pendidikan dan budaya serta nilai kemanusiaan;
- c. Merupakan kesempatan ekonomi dan sosial bagi individu dan bangsa melalui pembebasan dari perbudakan dan ketergantungan pada orang atau bangsa lain serta pembebasan dari kebodohan dan penderitaan”.

Pembangunan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pembangunan desa, yang mana Pembangunan Desa sesuai dengan aturan pada pasca orde baru melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, banyak referensi mengatakan membangun Desa pada masa ini justru pembangunan yang dimaksud menghancurkan sendi-sendi kekuatan Desa itu sendiri sebagai daerah yang otonom. Sebagai agen terdepan dan menyentuh serta berinteraksi langsung dengan masyarakat, Desa harus benar-benar diperhatikan dengan melakukan pembangunan dan penguatan Desa dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang mana pada saat ini desa selalu diidentikkan dengan keterbelakangan.

Dalam Syafrudin (2010: 32) dijelaskan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 ini mendapatkan kritikan karena penyeragaman nama, bentuk, susunan dan

kedudukan pemerintahan desa. Padahal dalam merumuskan arah kebijakan (*legal policy*), pemerintah desa perlu pengakuan dan penghormatan terhadap asal usul yang bersifat istimewa pada eksistensi desa, yakni dengan memperbolehkan penggunaan nama seperti dusun, marga, nagari, meunasah, gampong, negorij dan lain sebagainya, yang bentuk, susunan maupun mekanisme pemerintahan didasarkan pada adat istiadatnya masing-masing.

Berbicara tentang pembangunan desa terdapat dua aspek penting yang menjadi objek pembangunan. Menurut Ali Hanapiyah Muhi (2011: 4) “Secara umum pembangunan desa meliputi dua aspek utama yaitu pembangunan desa dalam aspek fisik dan pembangunan dalam aspek pemberdayaan insani. Pembangunan dalam aspek fisik yaitu pembangunan yang objek utamanya dalam aspek fisik (sarana, prasarana dan manusia) dipedesaan seperti jalan desa, bangunan rumah, pemukiman, jembatan, bendungan, irigasi, sarana ibadah pendidikan (*hardware* berupa sarana dan prasarana pendidikan, dan *software* berupa segala bentuk pengaturan, kurikulum dan metode pembelajaran), keolahragaan, dan sebagainya. Pembangunan dalam aspek fisik ini selanjutnya disebut pembangunan desa”.

Pemberdayaan Masyarakat menurut Widjaja (2005; 169) adalah “Upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, budaya dan agama”.

“Fungsi pemerintah baik pusat, daerah maupun desa adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan tersebut terdiri dari pelayanan publik, pelayanan pembangunan dan pelayanan perlindungan. Pemberian pelayanan tersebut ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat” (Nurcholis, 2011: 103). Dalam konteks desa pencapaian tujuan pembangunan

yang efektif bagi desa harus disertai dengan partisipasi masyarakatnya. Pemerintahan desa adalah pemerintahan yang memiliki hubungan lebih dekat dan harmonis dengan masyarakatnya. Mengingat masyarakat desa memiliki hubungan kekerabatan dan/ atau hubungan sosial, ekonomi dan keamanan yang menciptakan ikatan lahir batin di antara masyarakatnya.

Siagian (2009: 5) mendefinisikan “Administrasi pembangunan yaitu seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya”. Mostopadidjaya dalam Afiffudin (2010: 51) menyatakan bahwa “Administrasi pembangunan adalah ilmu dan seni tentang bagaimana pembangunan suatu sistem administrasi yang mampu menyelenggarakan berbagai fungsi pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien”. Dari pengertian administrasi pembangunan dapat dipahami sangat penting untuk kemajuan pembangunan suatu negara melalui usaha-usaha yang dilakukan pemerintah. Administrasi pembangunan mempunyai fungsi dalam perumusan kebijakan dan program-program pembangunan yang pelaksanaan dilakukan secara efektif untuk kesejahteraan rakyat.

METODOLOGI PENELITIAN

1. Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa sebagai variabel bebas (independent variabel) atau variabel X dengan indikatornya yaitu: *Idealized Influence* (Mengidealkan pengaruh), *Motivation* (Memotivasi) dan *Inspiration* (Menginspirasi).

Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan sebagai variabel terikat (dependent variabel) atau variabel Y dengan indikatornya yaitu: Merencanakan, Melaksanakan dan Melestarikan.

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010: 90). Adapun populasi pada penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun berdasarkan KK (Kartu Keluarga). Data tahun 2016 menunjukkan jumlah KK di Desa Pongkar adalah 663 KK.

b. Sampel

Menurut Sugiyono (2010: 91) Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki populasi. Adapun teknik sampel data pada penelitian ini menggunakan sampel acak (*random sampling*). Untuk menentukan berapa sampel yang dibutuhkan, penulis menggunakan rumus Slovin dalam perhitungan sampel (dalam Umar, 2002: 141) dengan kelonggaran ketidaktelitian sebesar 10%.

c. Analisis Data

Analisa kolerasi product moment digunakan untuk menguji apakah ada pengaruh antara variabel bebas (pengaruh kepemimpinan kepala desa) dengan variabel terikat (partisipasi masyarakat dalam pembangunan). Untuk memperoleh nilai-nilai yang jelas dari variabel yang dimaksudkan, maka perlu terlebih dahulu ditabulasikan dalam bentuk tabel-tabel atau penentuan skor.

PEMBAHASAN

Pembahasan dalam penelitian ini berisi tentang pengujian hipotesa dari rumus Koefisien Korelasi Product Moment dan rumus Koefisien Determinant.

1. Koefisien Kolerasi Product Moment

Untuk mengetahui apakah kolerasi ini signifikan atau tidak maka dibandingkan dengan “r” tabel Product Moment, dengan kriteria sebagai berikut. Jika “r” hitung > “r” tabel, maka Koefesien Kolerasi signifikan. Jika “r” hitung < “r” tabel, maka Koefesien Kolerasi tidak signifikan.

Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh dari responden diperoleh hasil dari ke-6 (enam) pertanyaan, jawaban seluruhnya **valid**. Berikut salah satu hasil dari beberapa perhitungan dengan menggunakan rumus Koefisien Kolerasi Product Moment:

N	: 87
$\sum xy$: 8196
$\sum x$: 355
$\sum y$: 1990
$\sum x^2$: 1487
$(\sum x)^2$: 126025
$\sum y^2$: 46118
$(\sum y)^2$: 3960100

$$r_{xy} = \frac{N\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{[N\sum x^2 - (\sum x)^2][N\sum y^2 - (\sum y)^2]}}$$

$$r_{xy} = \frac{87(8196) - (355)(1990)}{\sqrt{[87(1487) - (126025)][87(46118) - (3960100)]}}$$

$$r_{xy} = \frac{713052 - 706450}{\sqrt{[129369 - 126025][4012266 - 3960100]}}$$

$$r_{xy} = \frac{6602}{\sqrt{(3344)(52166)}}$$

$$r_{xy} = \frac{6602}{\sqrt{174443104}}$$

$$r_{xy} = \frac{6602}{13207,69}$$

$$r_{xy} = 0,499$$

Dari hasil perhitungan dengan rumus Koefisien Kolerasi Product Moment, maka dilihat dari beberapa hasil yang ada diambil satu dari hasil perhitungan tersebut yaitu sebesar **0,499**. Jika dilihat pada "r" tabel dengan taraf signifikan 5% untuk N= 87 diperoleh nilai "r" = **0,213** Jika dibandingkan dengan nilai "r" yang diperoleh dari hasil perhitungan rumus Koefisien Kolerasi Product Moment maka dapat dilihat bahwa "r" yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan "r" tabel Koefisien Korelasi Product Moment yaitu (**0,499 > 0,213**) itu artinya Koefisien Kolerasinya **Signifikan**. Selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara kedua variabel tersebut, digunakan penafsiran atau interpretasi angka yang dikemukakan oleh Sugiyono (2004: 214) seperti yang dikemukakan diatas pada tabel 3.2.pedoman untuk memberikan Interpretasi Koefisien Kolerasi. Dari hasil Kolerasi Product Moment sebesar 0,499 terdapat diantara 0,400-0,599 hal ini menunjukkan bahwa pengaruh kepemimpinan Kepala Desa terhadap

partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun berada pada kategori **Sedang**.

Untuk pengujian hipotesanya H_a diterima, dan H_o ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa **“Kepemimpinan Kepala Desa mempunyai pengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan walaupun tingkat kolerasinya (hubungannya) tidak tinggi atau rendah (sedang), tetapi hubungannya signifikan”**.

2. Koefisien Determinant

Untuk mengetahui berapa persen (%) pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) dapat dihitung dengan rumus Determinant sebagai berikut:

$$D = (r_{xy}^2) \times 100\%$$

$$D = (0,499)^2 \times 100\%$$

$$D = 0,249001 \times 100\%$$

$$D = 24,9001\%$$

Dari hasil perhitungan tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa pengaruh kepemimpinan Kepala Desa terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebesar 24,9001%.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang diambil dari penelitian ini adalah **“Kepemimpinan Kepala Desa mempunyai pengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan walaupun tingkat kolerasinya (hubungannya) tidak tinggi atau rendah (sedang), tetapi hubungannya signifikan”**.

DAFTAR PUSTAKA

- B.N Marbun. 2008. Proses pembangunan desa. Jakarta:Erlangga.
- Beratha,I Nyoman. 2002. Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Masri Singarimbun, Sofian Effendi. 2005. Metode Penelitian Survey. Jakarta: LP3ES.
- Matodang. 2008. Pembangunan pedesaan dan perkotaan. Makassar: Graha Ilmu.
- Nawawi, Hadari. 2003. Metode Peneitian Sosial.Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- R. Bintoro. 2003. Intraksi Desa, Kota dan Permasalahannya. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sholehuddin. 2008. Metodologi penelitian sosial. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Soetadjo Kartohadikoesoemo. 2004. Desa, PN. Jakarta: Balai Pustaka
- Taliziduhu Ndraha. 2002. Metodologi Penelitian Pembangunan Desa. Jakarta: Duta Aksara.
- The Liang Gie. 2006. Efisiensi Kerja Bagi Pembangunan Negara.Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Tjokromidjojo. 2006. Perencanaan Pembangunan. Jakarta: PT.Gunung Agung.
- Usman, Husaini dan Setiady Akbar.2006. Metodologi Penelittiaan Sosial. Jakarta: Bumi Akasara.